

MEWARTAKAN INJIL DALAM SITUASI PERALIHAN¹

Pastoral Transformatif bersama Rakyat Papua

Abdon Bisei

Abstract: Historically Papuans have been lived their life in terms of segments. There are three segments: OPM (Free Papuan Movement), Independence and OTSUS (Special Autonomy). These segments unfortunately push the Papuans to live "in between" or in a transitional period which is a logical consequence of policies of others. The segments pervasively constitute their identity with its particular character.

In this article the segment of OTSUS will be placed as the key point of spreading the gospel to Papuans. On the one hand, the key figure is Papuans who present the drama of grabbing the money of OTSUS. On the other hand, the key figure is the intellectual elite who presents the drama of getting certain political power. Both of them unconsciously how a fundamental mistake to properly understand the segment of OTSUS. In these circumstances, the church is critically challenged and called to proclaim the gospel as the sacrament of world salvation.

Keywords: Otsus • Uang • Kekuasaan • Advokasi • Mediasi •



Pendahuluan

Kosa kata yang melekat pada rakyat Papua selama satu generasi (empat dekade) terakhir ini, 1965 – 2008, yakni OPM, Merdeka dan Otsus. Kosa kata ini selalu dapat didengar dari mulut rakyat Papua dalam hidup sosial kemasyarakatan dan politik kenegaraan selama masa tersebut. OPM merupakan terminologi yang digunakan oleh sekelompok rakyat Papua yang berjuang untuk kemerdekaan Papua, sebagai kependekan dari Organisasi Papua Merdeka. Sinonim dengan OPM adalah GPK². GPK atau Gerakan Pengacau

¹ Artikel ini mulanya merupakan kuliah umum di hadapan sivitas akademis STPK "Santo Yohanes Rasul" Waena, tanggal, 05 Agustus 2008.

² Istilah lain yang sepadan dengan GPK adalah GPL (Gerakan Pengacau Liar), GSB (Gerakan Separatis Bersenjata. Pernah juga dilontarkan oleh pihak militer istilah SKP

Keamanan adalah terminologi yang digunakan oleh regim represif Orde Baru. Regim Orde Baru mengenakan bempet politik Golkar melahirkan sejumlah keputusan politis yang menguntungkan kekuasaannya. Tameng pengamanan melalui ABRI terutama pangkomkaptipnya. Tali temali Golkar dan ABRI menciptakan stabilitas nasional dengan mencengkram rakyat. Kelompok rakyat atau perorangan yang bersikap kritis apalagi menentang akan dilindas. Demikian sekelompok rakyat Papua yang bersikap kritis terhadap kebijakan pembangunan diberi stigma GPK oleh pihak keamanan. Di kalangan rakyat Papua, stigma ini menimbulkan ketakutan, ketidaknyamanan. Perasaan ini begitu menghantui, mereka diam membisu dan tidak mampu bersuara meski mengalami perlakuan tidak adil, penindasan yang kejam, bahkan ada yang mengalami kematian secara tragis.

Kosa kata yang kedua adalah Merdeka. Kosa kata ini bergulir ketika regim Orde Baru tumbang dan gema reformasi bergaung di seluruh tanah air. Tumbangnya regim Orde Baru ditandai dengan turunnya Jendral besar Haji Muhamad Soeharto sebagai presiden RI. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 22 Mei 1998 sewaktu umat kristiani sedunia merayakan pesta kenaikan Yesus Kristus. Gaung reformasi disambut di Papua dalam bentuk demo di taman Imbi, kantor DPRD I Provinsi Papua pada 02 Juli 1998. Reformasi diterjemahkan oleh orator-orator demonstrasi menjadi merdeka. Gema pesan reformasi yang menggelinding di Papua dalam pengertian merdeka, merupakan eforia rakyat Papua yang menyentuh semua lapisan, bukan saja hanya pada mereka yang bergerak pada akar rumput yakni lapisan rakyat yang paling bawah yang hidup di kampung-kampung, di pinggiran kota dan di hutan-hutan tetapi juga dan terutama justru oleh elit-elit terdidik dan politikus oportunistis yang sejatinya sebelumnya menikmati keuntungan dari regim yang berkuasa. Gerakan rakyat ini berpuncak pada pertemuan seratus tokoh Irian (Papua) dengan presiden Habibie 26 Februari 1999; di mana 98 % peserta pertemuan menyampaikan aspirasi untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Merdeka secara politis dan 2 % menolak Papua merdeka. Seratus tokoh peserta dialog ini dianggap representatif dari rakyat Papua.

Kosa kata yang ketiga adalah OTSUS, merupakan kependekan dari Otonomi Khusus. Sebagian besar rakyat Papua, yang berumur 12 tahun ke atas pada saat ini telah mendengar kata OTSUS. Cikal bakal kata Otsus bergulir bersama dalam rangkaian kata “Otonomi”, “Merdeka”, “Federasi”. Namun pilihan pemakaian kata Otsus ini diekspos secara resmi tanggal 21 November 2001, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21

(Separatis Kelompok Pemikir), dalam mensikapi adanya diplomasi damai yang memiliki akses internasional oleh sekompok rakyat dan LSM yang mencintai demokrasi, keadilan, perdamaian dan penghormatan akan hak-hak asasi manusia.

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Berdasarkan UU ini, Papua mendapatkan perlakuan khusus selama 25 tahun sejak UU ini ditandatangani oleh presiden RI. Otsus merupakan jawaban pemerintahan pusat atas tuntutan sebagian rakyat Papua untuk merdeka. Dengan kata lain UU Otsus merupakan *win-win solution* antara rakyat Papua dengan pemerintahan pusat. Substansi UU Otsus adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat rakyat Papua yang selama ini mengalami perlakuan tidak adil, tidak manusiawi dan tidak bermartabat. Namun fenomena umum yang tereksplisitasi di tengah rakyat adalah tuntutan akan pembagian dana otus, pembagian jabatan struktural daerah otonom melalui pemekaran provinsi, kabupaten, distrik dan kampung, serta pemberian jabatan vertikal (kakanwil, polisi dan militer, dan lain sebagainya) bagi putra daerah. Di kalangan lapisan akar rumput rakyat Papua, kata Otsus merupakan kata majemuk dalam rangkaian kata seperti uang Otsus, dana Otsus, mobil Otsus, kendaraan Otsus, pejabat Otsus; dan lain sebagainya.

Tiga kosa kata ini secara hakiki memperlihatkan gejala laten yang dialami oleh rakyat Papua dan mencerminkan suasana peralihan dari waktu ke waktu. Tiga kosa kata ini bukan merupakan suatu proses evolusi terminologis secara semantik, yakni berupa perluasan pengertian kosa kata yang terakhir dari yang sebelumnya. Kosa kata ini lebih merupakan episode historis dari satu peristiwa awal kepada peristiwa selanjutnya. Bahwa rakyat Papua dari masa ke masa senantiasa berziarah secara episodal guna menemukan identitas dirinya dalam kancah hidup bersama sebagai sesama bangsa Papua dan Melanesia, sesama warga Negara Indonesia, sesama umat manusia penghuni jagat ini.

Dalam perziarahan ini rakyat Papua senantiasa mengalami keterputusan dan ketersambungan. Rakyat terputus dengan satu habitus dalam satu mileu tertentu dan pada saat yang sama mereka tersambung pada habitus dan mileu yang lain. Mereka terputus dari suasana kolonialisasi Belanda serentak segera tersambung pada dinamika pergolakan dengan pemerintahan Indonesia antara merdeka dan bersatu dengan NKRI dalam kosa kata OPM-GPK. Mereka terputus dengan situasi laten OPM-GPK tersambung pada tuntutan Merdeka sebagai harga mati. Rakyat Papua terputus dengan gerakan kemerdekaan segera tersambung pada Otsus.

Tiga kosa kata ini sejatinya memberi nada dasar bagi kita pada karya pewartaan di tanah Papua ini. Nada dasar tersebut dapat diungkapkan dalam bentuk pertanyaan berikut: **Manakah fenomena empiris yang paling mempengaruhi konteks karya pewartaan Injil di era peralihan ini? Manakah substansi permasalahan yang memicu munculnya fenomena empiris sebagaimana adanya?** Pertanyaan-pertanyaan ini tidak serta merta diselesaikan dengan jawaban yang bersifat *problem-solving*,



apalagi jawaban berupa resep siap pakai. Pertanyaan ini menuntut kita untuk mendiskusikan bersama fenomena empiris yang dialami rakyat Papua sambil mata bathin kita tertuju pada panggilan kita sebagai murid Kristus di tengah dunia Papua yang real, yakni menjadi sakramen keselamatan dunia.

Kosa kata yang akan mengantar kita dalam diskusi pada artikel ini adalah Otsus. Bagi rakyat Papua era ini adalah era Otsus. Dari kaca mata akar rumput rakyat Papua, mereka tidak banyak memberi perhatian pada konsep abstrak tentang Otsus, definisi dan substansi persoalan Otsus. Bagi mereka Otsus adalah Otsus, sebuah nama diri, sama halnya seperti nama diri Anakletus, Yakoba; atau keterangan tempat seperti Abepura-Jayapura, Maumere-Flores atau Jakarta-Indonesia. Otsus merupakan nama diri dari berbagai fenomena baru yang muncul yang memberi harapan baru, dan mudahnya memperoleh uang dan barang.

Artikel ini akan mengulas Otsus dan pergumulan rakyat Papua dengan mencermati realitas yang terjadi di tengah rakyat Papua saat ini, dengan menyorotinya dari segi uang dan kekuasaan, menempatkan pergumulan tersebut dalam konteks nilai dasar rakyat Papua dan pada akhirnya menawarkan karya pastoral untuk menciptakan transformasi bagi rakyat Papua.

Otsus dan Pergumulan Rakyat

Otsus sebagai fenomena empiris nyata melalui pembangunan infrastruktur yang besar-besaran, pengadaan sarana dan prasarana transportasi, gerakan pemekaran: provinsi, kabupaten, distrik dan kampung; pembagian dana segar. Dua hal akan dibahas dalam pokok ini adalah pertama apa yang terjadi pada khalayak rakyat dan kedua apa yang terjadi pada kalangan sebagian *intelektual Papua*, khususnya sejumlah elit terdidik dan beberapa elit birokrat Papua.

Khalayak Rakyat dan Dana Segar

Hal yang paling menonjol pada khalayak rakyat Papua adalah keinginan untuk memperoleh dana segar dari instansi-instansi yang ada. Usaha untuk memperoleh dana segar ditempuh melalui berbagai macam cara dari yang paling bermartabat dan sangat bertanggungjawab sampai pada yang kurang bermartabat dan sangat tidak bertanggungjawab.

Sejumlah rakyat meninggalkan pekerjaan harian mereka seperti berkebun, menanam umbi-umbian dan sayuran, menokok sagu dan meramu hasil alam lalu beralih menjadi buruh harian dari proyek padat karya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Mereka bekerja pada sejumlah perusahaan

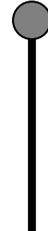


yang membangun infrastruktur dan prasarana transportasi, agroindustri (Kelapa sawit, Kakao) dan pengelolaan sumber daya alam. Pemekaran kabupaten dan distrik berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Penduduk lokal memanfaatkan peluang tersebut dengan bekerja pada proyek-proyek pembangunan yang ada sebagai tenaga kerja kasar, buruh harian. Peralihan pencaharian hidup komunitas setempat menyebabkan pada daerah-daerah kota yang baru, pasokan hasil kebun seperti sayur dan umbi-umbian sangat terbatas dan harganya menjadi begitu mahal.

Sejumlah rakyat yang lain, terutama kelompok muda terdidik “mendapatkan” pekerjaan baru. Mungkin jumlah mereka sangat kecil, tetapi fenomena pekerjaan baru dengan profesi sebagai *pembuat proposal* menggejala pada beberapa tempat. Para pembuat proposal ini kadang berasal dari inisiatif mereka sendiri, tetapi kadang juga jasa mereka digunakan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan, membuka perusahaan, mendirikan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Proposal dengan isi kegiatan sungguhan atau rekayasa menumpuk di meja sejumlah instansi pemerintah. Setiap saat, dengan mudah kita bisa menemukan sekelompok orang antri di kantor Daerah, kantor Dinas Kesejahteraan Sosial dan lain sebagainya untuk menyerahkan proposal atau memantau perkembangan proposal yang telah diserahkan.³ Kemudahan untuk mendapatkan uang melalui proposal menyebabkan tumbuh suburnya LSM sungguhan dan LSM gadungan, perusahaan-perusahaan fiktif dan real di Papua dengan tujuan utama menampung dana Otsus.

Bentuk lain untuk mendapatkan dana segar adalah pada moment-moment Pemilihan Umum untuk memperoleh anggota legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah (Provinsi maupun kota atau kabupaten). Masa diorganisir berdasarkan primordialisme etnis dan agama untuk mendukung calon legislatif maupun calon kepala daerah. Pada kesempatan tersebut rakyat dengan mudah memperoleh dana segar, bukan hanya memanfaatkan aspek primordial tersebut tetapi juga berdasarkan seberapa besar dana yang mengalir dari dompet-dompet calon legislatif dan calon pimpinan daerah. Maka sering terjadi bahwa orang yang sama menjadi partisipan atau peserta kampanye dari lebih dari satu partai politik atau satu calon kepala daerah,

³ Hal ini dikatakan oleh salah seorang staf dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua dalam satu pertemuan sosialisasi pemberian bantuan beasiswa studi akhir, di ruang pertemuan kantor dinas Kesejahteraan Provinsi Papua, Deplag, Jayapura. Pengalaman penulis beberapa kali mengunjungi daerah-daerah pedalaman menyaksikan adanya antrian orang untuk kepentingan proposal tersebut.



bergantung dari sumber dana yang diperolehnya. Jumlah masa bergantung pada dana yang dikeluarkan.⁴

Cara lain lagi untuk mendapatkan dana segar yakni melalui tuntutan ganti rugi tanah, palang-memalang fasilitas umum, palak memalak di jalanan atau dari rumah ke rumah. Persoalan ganti rugi tanah memang perlu penjernihan secara jelas. Bahwa sesungguhnya hak atas tanah dari rakyat Papua harus dilindungi dan jika proses pengalihan kepemilikan melalui cara-cara yang tidak adil bahkan perampasan yang merugikan rakyat Papua, maka penyelesaian atas kasus tersebut ditempuh melalui jalur hukum formal dan rakyat Papua harus dibela. Namun kadang juga dialami bahwa tuntutan ganti rugi atas tanah bersifat pemerasan dari sekelompok orang yang mengklaim sebagai tuan tanah atas sebidang tanah tertentu yang sebenarnya sudah memiliki status hukum yang jelas. Kelompok penuntut ini memanfaatkan era reformasi dan Otsus, yang saat ini. Terasa hukum dan peraturan serta aparat yang mengawal hukum dan peraturan kehilangan wibawa. Persoalan palak-memalak kadang disertai dengan kekerasan merupakan upaya mendapat dana segar sering dialami di daerah perkotaan dan semakin meluas di beberapa tempat dengan angka "permintaan" semakin meninggi. Para pelaku adalah preman-preman mabuk dengan sasaran para pemakai jalan, sopir-sopir angkutan umum⁵, bahkan kadang dialami juga oleh komunitas non Papua di rumah kediamannya.

Tersedianya dana segar yang memadai pada khalayak rakyat Papua menyebabkan perubahan pola konsumsi rakyat Papua, terutama komunitas-komunitas pada daerah-daerah pemekaran ibukota kabupaten baru. Pola konsumsi lokal berubah dari mengkonsumsi umbi-umbian dan sayuran, sagu dan hewan segar hasil buruan kepada makanan instan siap saji seperti mie, makanan kaleng, kue-kue hasil pabrik, minuman kaleng seperti *coca cola* dan sejenisnya. Kisah berikut dapat memberikan gambaran real terhadap fenomena perubahan pola konsumsi komunitas masyarakat lokal Papua.

⁴ Beberapa kelompok massa yang penulis kenal di Abepura pada masa kampanye pemilu 2009, mengaku memperoleh uang, transportasi dan nasi bungkus dari sejumlah partai politik menjadi peserta kampanye.

⁵ Sebagai contoh, salah satu peristiwa pemalakan Jumat 01 Agustus 2008. Terjadi pada ruas jalan Abepura – Keerom, kira-kira 10 Km sebelah timur dari Abepura. Sekelompok preman memalak seorang sopir mobil pribadi. Karena uang yang diserahkan tidak memenuhi harapan maka sopir dianiaya dan mobil *strada* yang dikendarainya dibakar. Keesokan harinya, Sabtu 02 Agustus 2008, datanglah serombongan orang dari kelompok sopir yang dianiaya menyerang penduduk kampung tersebut. Akibat penyerangan tersebut satu orang dari kampung yang diserang meninggal dunia dan 7 orang mengalami luka serius, 11 rumah rusak berat. Peristiwa ini dilansir oleh media lokal *Cepos*, 02, 03, 04 Agustus 2008.

Pada bulan Februari 2008, saya berkesempatan mengunjungi mahasiswa STFT yang menjalani masa Tahun Orientasi Pastoral di Abmisibil. Abmisibil adalah salah satu distrik dari kabupaten Pegunungan Bintang. Abmisibil berada pada ketinggian 5.900 *feet* di atas permukaan laut. Suhu udara berkisar antara 12^oC – 20^oC. Daerah ini selalu diselimuti oleh kabut dan hampir setiap hari hujan turun. Dari Jayapura untuk mencapai Abmisibil menggunakan pesawat udara jenis *cessna* atau *pilatus* selama dua jam, melewati ngarai yang terjal dan celah-celah gunung yang sempit. Kota distrik ini memiliki lembaga pendidikan dari tingkat SD sampai SMU, masing-masing satu sekolah. Terdapat PUSKEMAS, kantor distrik, pos polisi dan pos tentara, sejumlah kios yang menjual barang-barang hasil pabrik seperti mie instan, biskuit, gula, makanan dan minuman kaleng. Kios-kios ini dimiliki oleh komunitas yang berasal dari Toraja, Buton, Bugis, Makasar, Jawa. Ada 2 *Wartel* satelit salah satunya milik gereja katolik paroki Abmisibil dan yang lainnya milik salah seorang guru dari Jawa. Beberapa rumah memiliki antena parabola yang dapat menangkap siaran televisi dari dalam dan luar negeri. Tidak ada sepeda dan kendaraan bermotor. Transport satu-satunya untuk keluar dari Abmisibil adalah melalui udara dan jika terpaksa harus rela berjalan kaki berhari-hari. Dibutuhkan waktu lima hari untuk berjalan dari Abmisibil ke Oksibil ibu kota kabupaten. Topografi kota distrik ini berada pada lereng dengan kemiringan 30 – 80 derajat. Ada dataran di lembah dan di puncak. Penduduk kota distrik ini mayoritas komunitas lokal. Penduduk pendatang sangat kecil jumlah mereka. Komunitas pendatang bekerja sebagai guru, pegawai kesehatan (perawat/mantri, dokter), polisi, tentara, tukang dan wiraswasta yang membuka kios-kios.

Sewaktu di Abmisibil saya berkesempatan mengunjungi kampung *Ngilpoya*, (dalam bahasa setempat nama itu berarti: *Takut Dingin*). Jalan dari Abmisibil ke *Ngilpoya* ditempuh dalam waktu 2 jam, menyusuri lereng melalui jalan setapak yang becek dan licin. Di sepanjang jalan terlihat banyak sekali buah Markisa yang matang bergelantungan, pohon-pohon kopi jenis *Robustha* dengan buah lebat berwarna merah saga siap dipanen. Kedua jenis komoditas ini terkesan tidak dirawat, meski harga di pasaran sungguh bersaing. Yang menarik dari perjalanan ini adalah bahwa di tengah daerah yang masih asri alamnya, dengan hutan alamiah yang padat masih perawan, jernihnya air sungai dan segar udara yang tidak terpolusi; ternyata jalan setapak yang berbecek itu berserakan sampah-sampah hasil industri berupa plastik-plastik bungkus mie instan dan biskuit, kaleng-kaleng bekas makanan dan minuman (*sardens, coca cola* dan sebagainya). Jelas, sampah-sampah yang berserakan bukan diproduksi di Abmisibil. Bahkan barang-

barang tersebut masuk ke Abmisibil melalui udara dan karenanya harga yang ditawarkan di Abmisibil sangat mahal.⁶

Dari kisah Abmisibil ini dapat didiskusikan dua hal, yakni pertama pada lapisan akar rumput rakyat Papua sudah *mengenal* uang dan karena itu kedua, terkait dengan uang, mereka ingin *menikmati hasil pasar global gaya kelas menengah kota*, betapapun di antara mereka belum pernah ada yang ke kota dan melihat langsung kendaraan bermotor.

Peredaran uang pada era Otsus ini begitu besar di tanah Papua.⁷ Besarnya peredaran uang ini berasal dari (1) sumber penerimaan provinsi, kabupaten/kota meliputi: pos pendapatan asli daerah, dana perimbangan pusat dan daerah, penerimaan provinsi dalam rangka Otsus. (2) Sumber pendapatan asli Provinsi, kabupaten/kota meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah, pendapatan daerah yang sah. (3) Dana perimbangan bagi hasil daerah dengan pusat dengan prosentasi untuk daerah berupa: (a) bagi hasil pajak bumi-bangunan (90%); (b) bagi hasil sumber daya alam; (hutan 80 %, perikanan 80%, tambang umum 80%, minyak 70%, gas alam 70%) (4) dana alokasi umum, dana alokasi khusus (masing-masing 2%), (5) dana otonomi khusus 2% dari dana alokasi nasional; (6) dana tambahan yang diminta oleh provinsi untuk pembangunan infrastruktur (UU RI No. 21 bab IX fasal 33 dan 34).

Realisasi dari UU ini, dana yang beredar pada tahun 2003, seperti tampak pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Keuangan Daerah Tahun 2003 (dalam rupiah)

No	Sumber Pendapatan	Jumlah
1	Pendapatan Daerah	2.423.829.366.781,-
2	Pendapatan Asli Daerah	13.747.430.361,-
3	Dana Perimbangan	2.288.937.814.274,-
4	Bagi hasil Pajak SDA	58.474.540,-
5	Bagi hasil SDA	211.503.931.534,-

⁶ Satu bungkus mie instan di Abmisibil ditawarkan dengan harga Rp 15.000 – Rp 20.000,- bandingkan dengan Jayapura yakni Rp 1.500,- Begitu mahalnyanya tetapi ternyata produk-produk tersebut justru paling laris terjual. Mie instan kadang dikonsumsi langsung dari plastiknya, tanpa direbus.

⁷ Sebagai contoh, dana pemberdayaan kampung yang diperuntukkan bagi rakyat di kampung tersebut sebesar Rp 200 juta/tahun untuk masing-masing kampung.

6	Dana Alokasi Umum	395.159.550.000,-
7	Dana Alokasi Khusus	22.256.008.200,-
8	Dana Otonomi Khusus	1.539.559.850.000,- ⁸
	TOTAL	6.895.052.425.690,-

Sumber: diolah dari Umar, 2006: 38-73.

Angka peredaran uang ini belum terhitung keuangan yang dikelola oleh lembaga swasta dan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Papua seperti *Freeport* di Timika dan *LNG* di Bintuni, Perusahaan pertambangan minyak di Sorong.

Mencermati besarnya peredaran uang di tanah Papua, dan fenomena empiris di tengah rakyat Papua dapat ditarik kesimpulan bahwa uang memainkan peranan yang begitu besar dalam tata hidup rakyat Papua saat ini, tak terkecuali mereka yang ada di Abmisibil, para mahasiswa, pengangguran terdidik yang menggeluti profesi sebagai “pembuat proposal”, para preman di jalanan yang demi seteguk minuman keras memajak pengguna jalan umum, ataupun pejabat-pejabat birokratif dan legislatif yang berkendaraan mewah di kota-kota pesisir pantai seperti Jayapura, Biak, Nabire, Manokwari, Sorong dan Merauke. Uang telah sangat mempengaruhi cara berada manusia dan pola hidup bersama dalam masyarakat. Uang merupakan sesuatu hal yang baru, yang dimasukkan ke dalam tata hidup rakyat Papua tanpa suatu proses pemahaman yang mendalam tentang sistem ekonomi modern yang menggunakan alat tukar uang. Rakyat di kampung-kampung yang sebelumnya mengenal transaksi ekonomi dalam bentuk barter serta merta telah mengenal alat tukar dalam bentuk uang dengan jumlah yang besar. Prior (1993: 22-26) menggambarkan peran uang dalam tata masyarakat saat ini.⁹

Pertama, uang dan kemandirian. Rakyat Papua memiliki mekanisme sosial untuk menjamin hidup bersama berdasarkan sistim kekerabatan karena hubungan darah (adik-kakak, om-tante, bapatua-mamatua) atau hubungan perkawinan (ipar, mertua-menantu). Mekanisme ini menciptakan keterikatan dan tanggungjawab sosial yang menjamin kelangsungan

⁸ Pada tahun anggaran 2009, Dana Otsus sebesar Rp 3.728.280.000.000,- ditambah dana infrastruktur sebesar Rp 800.000.000.000,- (*Cepos* 31 Oktober 2008; mengutip Inya Bay SE, anggota DPR-RI Dapil Papua, yang menyampaikan hasil rapat pembahasan Panitia Belanja dan Anggaran Negara). DIPA yang diserahkan kepada Pemda Provinsi Papua (tidak termasuk provinsi Papua Barat) tahun anggaran 2009 sebesar Rp 19 Triliun (*Cepos*, Jumat 09 Januari 2009).

⁹ Paparan Prior berhubung dengan dunia tani masyarakat Nusa Tenggara Timur, namun beberapa serat analisisnya dapat dijadikan benang merah untuk meneropong peran uang bagi rakyat Papua saat ini.

kekerabatan di antara sanak saudara dan kelompok suku. Pemberian jaminan sosial ini berdampak pada, di satu pihak penerima jaminan tidak akan bekerja keras, memeras keringat; dan di lain pihak pemberi jaminan sangat terhambat kemajuan ekonominya karena terbebani oleh tanggungjawab sosial tersebut. Dengan adanya kepemilikan uang, rakyat Papua secara perlahan-lahan mulai membebaskan diri mereka dari keterikatan-keterikatan kekerabatan darah dan perkawinan. Seseorang menjadi lebih mandiri dan menjalin relasi sosial terbebas dari struktur-struktur sosial yang membebani. Uang menempatkan seseorang dalam menentukan relasinya berdasarkan kehendaknya sehingga muncul gejala egoistik dan individualistik yang kuat secara perlahan menggeser solidaritas dan tanggungjawab sosial yang melekat dalam budaya setempat.

Kedua, uang dan kebutuhan zaman ini. Uang secara kasat mata adalah kertas atau logam dengan tulisan angka-angka. Namun uang sangat berperan dalam mempermudah tukar menukar, yang memungkinkan seseorang menjawab kebutuhan yang diciptakan oleh hidup dewasa ini. Semakin banyak seseorang memiliki uang semakin dirasakan bahwa masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dan nafsu untuk memilikinya semakin tinggi. Uang telah menyuburkan budaya konsumeris di kalangan rakyat Papua. Uang menciptakan impian bahwa kebahagiaan terletak pada banyaknya uang yang dimiliki dan jumlah barang yang dibelanjakan, terlepas dari efektifitas dan efisiensi barang belanjaan tersebut.¹⁰ Memiliki uang berarti mempunyai peluang untuk berbuat (berbelanja) apa saja demi memuaskan hasrat yang terendap dalam bathin seseorang. Uang seakan menjadi raja yang mampu mengatur segala hal berdasarkan kehendaknya. Uang menjadi sumber kepuasan yang memberi keuntungan dengan segera. Tatanan hidup dalam budaya lokal yang menekankan partisipasi setiap orang secara pribadi demi kelangsungan hidup bersama sebagai cara mengada, dengan adanya uang, cara mengada setiap orang ditentukan oleh apa yang dikonsumsi. Dalam terminologi Prior (2000) terjadi pergeseran dari budaya "*We participate, therefore, we are*" menjadi "*I consume, therefore, I am*". Terjadi suatu lompatan yang begitu jauh dari budaya pra-modern ke post modern tanpa melalui budaya modern. Dengan kata lain, uang telah menjadikan rakyat Papua melompat sejauh 15 abad, sehingga kehilangan

¹⁰ Pernah terjadi seseorang dari pedalaman berkunjung ke kota Jayapura. Ia membeli televisi, VCD lengkap dengan beberapa keping CD lagu dan film. Sekembalinya di kampung ia tidak bisa menggunakan peralatan tersebut karena di tempat tinggalnya belum ada jaringan listrik dan tidak ada keluarga yang memiliki mesin genset. Selang beberapa waktu kemudian, ia dapat membeli genset, dengan akibat pengeluaran semakin bertambah karena supaya genset dapat berfungsi dibutuhkan bensin. Harga bensin di tempat tersebut satu liter Rp 40.000,- (Diturunkan oleh seorang pastor yang bertugas di daerah pegunungan pada Februari 2008).

budaya yang mengandalkan rasionalisasi dari masa *pencerahan*, abad pertengahan pada arus budaya “*I think, therefore I am*”.

Ketiga, uang sumber kekuatan. *Money is power*, yang memberi kekuatan dan kekuasaan bagi pemiliknya. Kekuatan dan kekuasaan itu terjadi karena uang berperan juga sebagai alat pembayaran jasa. Relasi sosial berdasarkan tanggungjawab dan kewajiban yang secara resiprositas diatur dalam norma hidup bersama cenderung bergeser pada pembayaran dalam bentuk upah kerja, uang duduk, uang saku, uang jalan dan sebagainya. Komitmen pemberian diri terhadap kegiatan yang bersifat sosial dan rohani semakin rendah digantikan oleh iklim penjualan jasa. Hampir semua kegiatan sosial dan rohani dihargai dengan uang. Pada beberapa tempat di keuskupan Jayapura, sejumlah pastor mengeluh bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh Gereja kurang mendapat sambutan dari umat dibandingkan dengan kegiatan LSM atau Pemerintahan. Hal ini disebabkan LSM dan Pemerintahan, ketika menyelenggarakan kegiatan memberikan uang duduk, uang saku dan uang jalan bagi peserta, sedangkan pihak Gereja jika mengadakan kegiatan meminta sumbangan dari peserta yang terlibat dalam kegiatan. Keuskupan Jayapura yang gencar mengembangkan program strategis arah umum keuskupan melalui pembentukan komunitas basis ditanggapi oleh umat dengan harapan mendapatkan dana respek sebesar Rp 200 juta per komunitas basis, untuk menyamakan kegiatan keuskupan dengan dana pemberdayaan kampung dari pemerintah provinsi Papua sebesar Rp 200 juta per kampung. Barangsiapa yang memiliki uang dia mempunyai kuasa atas orang lain.

Keempat, uang dan mentalitas boros. Pola hidup peramu menganut prinsip “apa yang diperoleh hari ini, habiskan hari ini” dengan langsung menarik keuntungan dari alam dan sesama serta kesempatan yang ada di sekitarnya. Sesama dan alam sekitar merupakan alamat untuk “dipetik” dan karena itu kaum peramu hanya menjadi antusias dengan hal-hal yang langsung dinikmati (Boelaars 1986: 10-11). Pola hidup ini kalau dihubungkan dengan etos kerja, nyata bahwa kaum peramu memiliki etos kerja yang rendah, karena alam telah menyediakan semua baginya. Sumber makanan berlimpah di mana-mana, siap dipetik dan dikonsumsi. Jaminan hidup selalu tersedia karena itu tidak perlu memeras keringat berlebihan. Kelimpahan uang Otsus bagi sekelompok orang, telah menciptakan “peramu modern” yang cenderung melahirkan mentalitas boros tanpa batas dan rendahnya penghargaan akan kerja keras mengucurkan keringat untuk mendapatkan uang. Mentalitas ini mematikan seluruh daya kreasi rakyat pada satu sisi dan pada lain sisi meningkatkan ketergantungan terhadap sumber dana yang “dipetik” terus. Jika ada uang, uang digunakan sampai habis. Penggunaan keuangan, tidak didasarkan atas suatu manajemen keuangan demi efektifitas dan efisiensi, tetapi lebih didasarkan pada “perayaan kebersamaan” untuk

menghabiskan saja apa yang tersedia. Bentuk “perayaan kebersamaan” sangat beragam dan tidak jarang berupa konsumsi minuman keras yang berlebihan, sampai ada yang meninggal karena alkohol. Jika tidak ada uang, berbagai cara digunakan untuk “memetik” dari sesama lewat praktek-praktek yang tidak bertanggungjawab dan meresahkan seperti tuntutan ganti rugi yang tidak proporsional, pemerasan, dan lain sebagainya.

Apa yang dikisahkan tentang Abmisibil, bukan sekedar plastik-plastik sampah industri dan perubahan pola konsumsi rakyat. Plastik-plastik itu mengungkapkan bahwa dunia saat ini berada dalam bingkai budaya teknologi dan transformasi yang dikuasi oleh segelintir orang pemilik modal besar dan merekalah menguasai mayoritas rakyat. Kisah plastik-plastik Abmisibil dan analisa mengenai peran uang bagi rakyat Papua masa kini, memperlihatkan kepada kita bahwa di balik kelimpahan uang Otsus, ternyata arus globalisasi telah menerpa juga rakyat akar rumput di kampung-kampung pegunungan di tanah Papua.

Episentrum dari arus ini adalah kapitalisme-liberal yang disponsori oleh Amerika Serikat bersama dengan negara maju yang tergabung dalam G-7 dan anggota WTO. Rakyat akar rumput dan mungkin juga kebanyakan dari kita, juga tidak tertutup kemungkinan para pejabat birokrat dan legislatif, kurang memahami dengan betul sistem ekonomi kapitalis liberal saat ini. Dampak yang diakibatkan dari sistem ekonomi liberal pada jangka panjang sangat berat karena jurang antara yang kaya dengan yang miskin semakin lebar. Kelompok rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin banyak dan terdesak ke pinggir mengalami penderitaan yang besar sedangkan sekelompok kecil, orang yang memiliki kekayaan berlimpah, jarang menaruh simpati kepada orang-orang miskin. Sistem ini mendatangkan kerusakan atas tata hidup sosial yang menekankan solidaritas dan kekerabatan.

Dampak dari kapitalisme-liberal ini mencampakkan rakyat Papua ke dalam situasi yang dapat berdampak panjang pada penderitaan mereka (Prior, 1996: 56-57). Rakyat Papua sendiri kemungkinan besar tak pernah menyadari akan dampaknya pada masa depan.

Sistem perekonomian setempat dari dunia peramu dan petani ladang sederhana, bergerak begitu lamban untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam skala kecil *digilas* oleh perputaran modal dari kaum kapitalis yang begitu cepat berskala besar. Didukung oleh kemudahan mendapatkan dana segar dari Otsus antara lain melalui program dana respek, telah mendorong rakyat di kampung-kampung bergegas lari ke kota sekedar dapat menikmati gaya hidup kelas menengah kota. Kemudahan jalur transportasi udara dari kampung-kampung daerah pedalaman ke kota dengan frekuensi penerbangan yang tinggi telah menyumbangkan mentalitas urban bagi



penduduk di pedalaman. Fenomena empiris tampak memperlihatkan bahwa bukanlah hal asing, rakyat Papua pada komunitas-komunitas di pedalaman sudah biasa mengkonsumsi makanan dan minuman siap saji (*fast food*) cerminan gaya hidup kelas menengah kota. Persinggahan kapal-kapal penumpang di daerah pantai dari pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain, dengan daya angkut yang banyak dan kecepatan yang tinggi mendorong komunitas setempat untuk menjelajah daerah-daerah baru yang sebelumnya hanya terdengar di telinga. Dampak yang lain, bahwa kapal-kapal tersebut telah menghempaskan angkutan rakyat berupa perahu bercadik atau perahu layar motor yang dikelola komunitas etnis setempat.

Intensitas sistem perekonomian rakyat di kampung berskala kecil dan tradisional dalam bentuk barter, resiprositas, perlindungan terhadap alam dan lingkungan demi kemudahan mendapatkan sumber-sumber protein perlahan-lahan *tergusur* oleh kekuatan modal yang bisa mengisap secara cepat sumber daya alam yang ada dan mengalirkannya ke kantong-kantong pihak pemilik modal yang berinvestasi. Dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, rakyat akan kehilangan sumber daya alamnya dan dipermiskin secara struktural oleh kelompok yang kaya. Dana segar yang tercurah kepada rakyat memang memberi kepuasan sesaat bagi rakyat, namun dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketergantungan rakyat Papua begitu besar terhadap pemilik modal atau setidaknya-tidaknya pihak-pihak yang memiliki uang. Ketergantungan tersebut membuat orang bersikap bukan lagi berdasarkan atas kejernihan suara hati dan kemurnian motivasi tetapi oleh keterpaksaan dari luar. Manakalah rakyat telah kehilangan hewan-hewan buruan dari hutan karena hutannya telah digasak oleh pemilik modal, mereka akan bergantung pada sumber protein produk industri dari luar dalam bentuk *fast food* atau daging kalengan, yang mutunya pasti jauh di bawah protein segar hasil buruan dan olahan sendiri. Terjadi keenganan rakyat untuk menanam umbi-umbian karena menunggu masa panen yang lama dan cara perawatan yang dirasa memberatkan jika dibandingkan dengan *mie instan* (sejenis *Indomie*, *Supermie*, *Sarimie*) yang begitu dibutuhkan segera akan terpenuhi. Tak perlu lama menunggu dan repot mempersiapkan.¹¹

Penggunaan antena parabola dan telepon satelit sudah merupakan hal biasa di beberapa tempat pedalaman Papua. Jaringan komunikasi ini menjerat rakyat dengan sengatan yang meracuni pikiran mereka. Rakyat seakan-akan diarahkan bahwa makna hidup diukur melalui banyaknya

¹¹ Menurut pastor-pastor yang bertugas di daerah pegunungan (Kabupaten Pegunungan Bintang, Puncak Jaya); mie instan merupakan barang dagangan yang paling laris. Begitu diturunkan dari pesawat, habis terjual di bandara sebelum sempat mengendap di kios.

chanel televisi yang dapat menangkap siaran berbagai stasiun televisi atau luasnya jangkauan berkomunikasi dengan sahabat-kenalan di tempat yang jauh melalui peralatan canggih telepon nir kabel.¹² Bumi seakan menjadi sempit, sehingga apa saja yang terjadi di belahan bumi yang lain pada saat yang sama diketahui juga oleh komunitas lokal Papua di daerah pegunungan. Rakyat seakan lebih akrab dengan muka Ronaldinho atau Barach Obama daripada tetangganya. Informasi yang tidak *balance* ini membuat rakyat hanya sebagai pihak yang dijejali dengan idiologi asing dan lebih menghargai nilai-nilai yang ditawarkan dari luar sehingga lama-kelamaan akan kehilangan kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Bukan hanya bumi menjadi sempit, tetapi langitpun seakan menjepit dengan berbagai satelit yang menawarkan kemudahan berkomunikasi sehingga membuat kita lebih komunikatif dengan sahabat yang jauh daripada anggota keluarga atau teman semeja makan. Komunikasi yang tidak sehat ini memberi suatu ironi sendiri bahwa semakin mudahnya alat komunikasi semakin sulitnya terjadinya pertemuan tatap muka. Nilai pertemuan bersama lebih bersifat seremonial dari pada kebutuhan untuk afeksi dan saling berbagi.

Elit Intelektual dan Kekuasaan

Di kalangan sebagian intelektual, birokrat dan politisi Papua, fenomena sosial-politis yang menonjol adalah kekuasaan. Hal ini terungkap melalui desakan terhadap pemekaran daerah baik pemekaran provinsi,¹³ maupun pemekaran kabupaten.¹⁴ Isu pemekaran bagaikan bola salju yang digelinding

¹² Pastor paroki Oksibil, melaporkan bahwa sebulan ia bisa menjual *voucher* telepon Rp 50.000.000,- s/d 60.000.000,-. Segmen pembeli mayoritas komunitas etnis setempat, sisanya adalah pegawai pemerintah, para pemborong dan tukang pada umumnya etnis pendatang yang bertugas di kota Oksibil. Komunitas setempat mendapatkan uang dari proyek padat karya yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui dana Otsus. Sebagai contoh jasa borongan untuk perintisan jalan sepanjang 1 KM di kota Oksibil sebesar Rp 50.000.000,- (informasi via telepon 15 September 2008, 19.10 Waktu Papua)

¹³ Provinsi Papua pernah dimekarkan menjadi 3, yakni Provinsi Irian Jaya, Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat, namun kemudian dibekukan. Semasa Otsus (sejak 2001), wilayah Papua secara defenitif dimekarkan menjadi dua provinsi. Akhir-akhir ini santer terdengar isu pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Bomberay (daerah “Tembolok Burung”).

¹⁴ Jumlah kabupaten setanah Papua saat ini sebanyak 34 kabupten dan ada gerakan begitu kuat agar sejumlah kabupaten dimekarkan lagi. Sejumlah elit intelektual Papua dan pejabat birokrasi dan legislatif berperan besar dalam proses pemekaran kabupaten ini. Ada kecenderungan kuat bahwa setiap kelompok etnis (suku) akan menjadi kabupaten tersendiri.

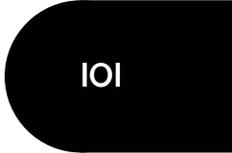


oleh sejumlah intelektual Papua dan dimotori oleh segelintir elit birokrat yang hampir (sudah) berakhir masa jabatannya serta dikondisikan oleh beberapa politisi yang kehilangan peluang menjadi anggota legislatif. Ada upaya persuasif untuk mengkonstruksi pikiran rakyat guna mendapatkan kesan bahwa pemekaran adalah kehendak rakyat. Cara yang digunakan dengan memfasilitasi rakyat agar berperan sebagai kelompok pendesak (*pressure group*) melalui isu-isu etnis dan kesejahteraan.¹⁵ Argumentasi yang sering terdengar adalah pemekaran untuk mengurangi rentang kendali administratif dan memperpendek akses rakyat kepada pusat pelaksana kekuasaan dan penentu kebijakan. Ada upaya pembentukan opini umum seakan-akan pemekaran semata-mata demi kesejahteraan rakyat.

Diskusi selanjutnya akan mengarah pada jawaban atas pertanyaan mengapa animo akan kekuasaan dalam bidang politik dan birokrasi pemerintahan bagi sebagian besar elit intelektual Papua begitu tinggi? Ada dua hal yang akan diulas yakni kekuasaan sebagai jaminan ekonomi dan kekuasaan sebagai pembuktian akan identitas diri kepapuaan.

Kekuasaan: Jaminan Ekonomi

Otsus merupakan solusi dari Jakarta (pemerintahan pusat) terhadap tuntutan rakyat Papua untuk merdeka. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengalaman sejarah sampai pada masa Orde Baru. Pada masa itu mayoritas rakyat Papua termarginalisasi secara sosial-politis, terdesak secara ekonomis dan tertekan secara psikologis. Marginalisasi sosial-politis terlihat melalui jabatan-jabatan birokratis strategis di bidang pemerintahan baik kabupaten maupun provinsi belum banyak dipegang oleh putra-putri Papua.¹⁶ Pada lapisan akar rumput, rakyat terdesak secara ekonomis karena peta demografis mengalami perubahan dengan adanya transmigrasi baik spontan maupun terprogram, mengakibatkan lapangan kerja dan peluang usaha, terutama usaha kecil dan menengah dikuasai oleh komunitas non Papua (Broek 1998: 42-43).



¹⁵ Beberapa kali pemerintahan pusat di Jakarta (Presiden, DPR, Kantor Kementerian Dalam Negeri) mendapat “kunjungan” dari sekelompok orang yang mengaku utusan-utusan rakyat Papua yang mengusulkan pemekaran atas daerahnya baik provinsi maupun kabupaten.

¹⁶ Gubernur Papua sejak tahun 1980 dijabat oleh putra Papua tetapi wakil gubernur berasal dari non Papua dan/atau militer hingga 2000. Demikian juga mayoritas bupati-bupati di provinsi Irian Jaya, kepala-kepala dinas baik tingkat provinsi dan kabupaten berasal dari non Papua. Di antara pejabat non Papua terdapat mereka yang memiliki prestasi kerja yang sangat baik, pengabdian yang total demi rakyat Papua, pemberian diri yang tinggi dalam tugas dan komitmen yang kuat dalam pembangunan.



Otsus memberi prioritas bagi rakyat Papua untuk menjadi tuan atas negerinya sendiri. Suatu diskriminasi positif demi perlindungan bagi rakyat Papua. Prioritas ini memberi ruang bagi rakyat Papua berupa kebebasan berekspresi dan bereksperimen. Di kalangan sejumlah elit intelektual Papua dan segelintir birokrat putra daerah, ruang itu diisi dengan wahana politik yang bernuansa kekuasaan. Pengisian wahana politik dalam ruang Otsus ini menitik beratkan pada aspek kewenangan (*otoritas*) dan kekuatan (*power*)¹⁷ yang berorientasi pada pengisian sejumlah jabatan birokrasi dan politik disertai tuntutan kuat untuk menduduki posisi kekuasaan. *Mind-setnya* adalah menjadi penguasa berarti memiliki kewenangan dalam mengatur tata hidup bersama melalui keputusan-keputusan politik dan kebijakan-kebijakan strategis. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan peluang-peluang ekonomis bagi jaminan hidup pribadi dan kesejahteraan bersama. Ada korelasi yang signifikan antara kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Semakin berkuasa berarti semakin besar peluang untuk menjamin kesejahteraan pribadi dan bersama. Dan sebaliknya memiliki kekayaan semakin besar peluang untuk berkuasa. Kerangka berpikir demikian membuat sejumlah elit intelektual, birokrat dan politisi berlomba-lomba menjadi penguasa dan jika sudah berkuasa akan sulit melepaskan kekuasaannya. Kekuasaan dianggap sebagai jaminan ekonomi.

Daya tarik kepada kekuasaan ini dari segi ekonomis memang menggiurkan. Terjadi perubahan yang cukup signifikan secara fenomenal dari penampilan sejumlah penguasa. Meskipun secara statistik perlu penelitian yang komprehensif dengan data-data yang valid, tetapi secara faktual dapat terlihat antara lain melalui peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dari berbagai jenis oleh sejumlah penguasa, larisnya bisnis properti berupa hunian berkelas yang dibeli oleh penguasa. Adanya rumah-rumah pribadi sejumlah penguasa yang bernilai ratusan juta bukan rahasia umum lagi, kegiatan perjalanan luar daerah atau luar negeri para pejabat dibalut dengan alasan kepentingan dinas yang didanai oleh negara (Otsus) semakin biasa. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan pendapatan secara ekonomis sebagai penguasa di masa Otsus ini, dibandingkan dengan sebelum menjadi penguasa atau ketika menjadi penguasa sebelum Otsus.

Kecenderungan menempatkan motif ekonomi di balik kekuasaan menyebabkan kekuasaan sebagai komoditas. Artinya, kekuasaan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga terjadi tawar-menawar yang alot untuk

¹⁷ Wewenang merupakan kekuasaan yang dilembagakan. Kekuatan merupakan tingka laku yang diperlihatkan berdasarkan wewenang. Weber membedakan tiga macam wewenang yakni tradisional, kharismatik dan legal-rasional. Spektrum kekuasaan di masa Otsus ini bergerak dari kewenangan tradisional untuk mendapatkan legitimasi secara rasional.



menduduki kekuasaan. Kekuasaan dapat diperjual-belikan dari satu orang kepada yang lain dan/atau dapat dipindahkan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Gejala ini menyata melalui upaya pemanipulasian suara semasa pilkada dan pemilu legislatif, politik uang melalui tim sukses sewaktu kampanye dan “serangan fajar” pada hari “h” pelaksanaan pemilu atau pilkada, pergerakan masa dari satu tempat ke tempat lain untuk mensukseskan calon tertentu. Transaksi lobi politik dan tawaran bersifat ekonomis berlangsung juga melalui dinamika penetapan rancangan-rancangan perundangan, perda, perdasi, perdasus untuk dijadikan keputusan permanen. Transaksi ini biasanya berlangsung antara eksekutif dengan legislatif. Kost untuk kepentingan ini biasanya lebih tinggi dari gaji resmi sebulan. Pemangkuan atas satu jabatan strategis tidak lagi didasarkan oleh mekanisme pengkaderan dan penjenjangan dalam hal karier, melalui uji kelayakan, tetapi lebih menunjukkan aspek “karbitan” dan budaya “mumpungisme”. Dampaknya sungguh terasa dalam irama kerja dan pembinaan karier terhadap staf atau bawahan.

Kekuasaan: Bukti Kesadaran akan Identitas Diri

Reformasi di Indonesia menghasilkan dua pemahaman baru di kalangan rakyat Papua. *Pertama* bahwa kekuasaan, betapapun sangat totaliter dan dikendalikan oleh regim otoriter yang represif dapat ditumbangkan oleh kekuatan rakyat, dan karena itu, *kedua* bahwa peluang Papua untuk merdeka merupakan sesuatu yang (agak) pasti dan karenanya dapat diperjuangkan. Pemahaman ini merupakan bibit baru bagi tumbuh dan berkembangnya kesadaran akan jati diri ke-Papua-an rakyat Papua.

Rakyat Papua menyadari bahwa mereka secara fisik bukan merupakan bagian dari ras Melayu berkulit terang, berambut lurus, berhidung mancung dan kecil. Rakyat Papua menempatkan diri sebagai ras Melanesia berciri negroid yang kebanyakan berkulit hitam, berambut kriting, berhidung besar dan lebar. Begitu juga secara kultural, mereka berbeda dengan saudara-saudara mereka di bagian barat pulau Papua. Kebudayaan rakyat Papua bersifat egaliter dengan sistim organisasi sosial politik bercirikan fragmentaris dengan berbagai unit kecil yang menekankan solidaritas dan kesejahteraan bersama. Unit-unit kecil yang ada tidak memiliki sistim politik yang permanent (Whiteman, 1984: 92-93). Hal ini berbeda dengan budaya Indonesia yang feodalistik serta sistim tata Negara (kesatuan yang besar) diliputi oleh rekayasa dan pemaksaan idiologi.

Kesadaran akan jati diri kepapuaan dalam episode sejarah Papua berkecenderungan membangkitkan fanatisme etnis sebagai suatu bentuk ekspos dari aspirasi untuk mendapat pengakuan akan hak dan martabat. Budaya lokal termarginalisasi oleh hegemoni kekuatan budaya baru yang datang dari luar. Di masa Otsus, komunitas lokal rakyat Papua yang



terasingkan secara mental dan terpasung secara kultural menemukan ruang untuk mengungkapkan jati diri mereka. Suatu kesempatan pengungkapan jati diri kepapuaan secara sesungguhnya, melalui kekuasaan.

Sebagian elit intelektual Papua yang merambah wilayah kekuasaan justru mau membuktikan bahwa orang Papua mampu mengurus dirinya sendiri dengan menjadi “tuan di atas tanahnya sendiri”. Sebagian lain lagi memaknai kesempatan berkuasa sebagai peluang untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi, politik, sosial dan budaya serta agama atau teologi kepada rakyat Papua. Mereka sendiri menjadi subyek karena episode sebelumnya kekuasaan yang ada telah menyebabkan rakyat Papua tercabut dari akar-akar agama dan budaya (Giay, 2000: 81).

Tuntutan rakyat Papua yang selama ini tidak terarah kemudian tertuju pada sasaran yang bersifat politik yakni kekuasaan secara khusus menjadi pemimpin. Lahirnya kesadaran bahwa orang Papua bisa memimpin dirinya dan sesamanya dalam mengatur tata hidup berpolitik dan berbangsa. Kelompok intelektual menempatkan paradigma kesadaran ini pada tataran praktis dalam bentuk Papuanisasi. Papuanisasi dimaknai sebagai “proses orang Papua menjadi dirinya sendiri, menjadi subyek, menjadi aktor dan belajar untuk menata masa depannya sebagaimana yang diinginkannya” (Giay 2000: 27). Medan politik dalam pengertian kekuasaan, bagi sebagian elit-elit intelektual Papua, mempunyai nilai tertinggi karena membuat seseorang mendapatkan pengakuan sosial sebagai pria berwibawa (*big man*).

Proses ini dalam episode Otsus diawali dengan pemegang kedaulatan terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan di Papua di tingkat kampung sampai dengan tingkat Provinsi adalah orang-orang Papua, secara genetis. Kepala kampung, kepala distrik, kepala daerah tingkat II (Bupati) dan I (Gubernur) dijabat oleh orang Papua.¹⁸ Kemudian pengisian jabatan-jabatan struktural birokrasi serta pengangkatan PNS yang baru, mengutamakan putra daerah Papua. Beasiswa dan bantuan-bantuan sosial lainnya menempatkan hak “kesulungan” kepada anak-anak Papua.

Oleh segelintir (calon) penguasa, terutama kalangan intelektual, kekuasaan dimaknai sebagai moment untuk “meluruskan sejarah”. Tujuannya adalah untuk menemukan jati diri kepapuaan yang sesungguhnya dan kesempatan untuk membangun Papua Baru yang merdeka, berdaulat, berkeadilan dan bermartabat (Giay, 2000: 28). Idealisme segelintir intelektual semacam ini pada tataran praksis lapangan disertai dengan upaya pembentukan opini di kalangan rakyat akar rumput melalui proses

¹⁸ Fenomena desakan pemekaran kabupaten, provinsi oleh sekelompok elit intelektual dan birokrat dicurigai mempunyai korelasi yang signifikan dengan keinginan untuk menjadi pemimpin dan hasrat pembuktian akan hak kesulungan atas teritorial tertentu.



penyadaran di satu pihak dan di lain pihak melalui jaringan kerjasama sejumlah pihak guna mengangkat isu-isu lokal penyebab penderitaan rakyat agar dikenal oleh dunia internasional.

Inilah fenomena empiris yang paling menonjol di masa Otsus ini baik pada kalangan rakyat akar rumput maupun pada kalangan elit intelektual. Gereja yang berada di tanah Papua, mengalami secara langsung situasi ini. Bahwa apa yang dialami oleh rakyat Papua dialami juga oleh Gereja, karena Gereja adalah umat yang terdiri dari hirarki dan awam, para pejabat struktural institusional dan umat biasa yang bergelut dengan hidup harian yang bersifat profan dan duniawi. Di dalam situasi yang demikian inilah Gereja dipanggil menjadi sakramen keselamatan dunia (*Lumen Gentium* 4) menjadikan kegembiraan dan harapan rakyat Papua, duka dan kecemasan orang-orang di bumi Cendrawasih ini sebagai kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus (bdk. *Gaudium et Spes* 1). Jawaban atas panggilan ini diwujudkan melalui pewartaan Injil. Bagaimana mewartakan Injil dalam situasi peralihan ini.

Sebelum mendiskusikan lebih lanjut, kita perlu menelaah terlebih dahulu nilai utama rakyat Papua, untuk menjawab pertanyaan kedua dari artikel ini yakni: **Manakah substansi permasalahan yang memicu munculnya fenomena empiris sebagaimana adanya pada masa peralihan ini?**

Fenomena empiris yang menggejala pada situasi Papua dalam masa peralihan ini mengandung muatan budaya tersendiri. Budaya dalam pengertian nilai-nilai utama (*core value*) yang dianut oleh komunitas rakyat Papua yang menyata melalui cara tindak dan cara berada dari satu komunitas. Nilai utama bagi rakyat Papua adalah hidup yang berkelimpahan (*abundant of life*). Hidup yang berkelimpahan bukan hanya mengandung arti ekonomis tetapi juga biologis, sosial, politis. Dari segi ekonomi, hidup yang berkelimpahan diperlihatkan melalui akumulasi kekayaan berupa uang, babi, kepemilikan barang-barang yang berharga. Dari segi biologis menyata melalui hidup yang sehat, kesuburan dan hasil panen atau buruan yang melimpah, tidak ada penyakit dan kematian. Secara sosiologis hidup berkelimpahan menyata melalui relasi yang luas dengan semua komponen masyarakat, pemberian jaminan sosial bagi anggota komunitas, keterampilan dalam mempertahankan relasi yang ada dan membangun relasi baru. Dari segi politis, hidup yang berkelimpahan nampak dalam kemampuan menyelesaikan perkara-perkara dalam komunitas, kewibawaan dalam mengatur strategi perang, mengkoordinir konfederasi perang dan memenangkannya, disegani oleh komunitas internal dan ditakuti oleh lawan (Whiteman, 1984: 92-93; Alua, 2004: 17-22). Seluruh usaha dan perjuangan komunitas Papua terarah kepada hidup yang berkelimpahan. Dengan kata



lain hidup yang berkelimpahan merupakan kualitas hidup yang disukai, yang diinginkan, diperjuangkan oleh setiap individu dari komunitas Papua.

Hidup yang berkelimpahan terarah kepada *ego* (aku), yang sumbernya berasal dari alam yang tersedia dan sesama yang ada di sekitar *ego*. Alam dan sesama selalu merupakan "panen" bagi *ego*. Dengan kata lain, *ego* yang berusaha untuk memperoleh hidup yang berkelimpahan menarik keuntungan dari alam dan sesama yang hidup bersama dia (Boelaars, 1986: 10). Dan usaha tersebut hampir selalu terpenuhi. Oleh karena itu *ego* ini hanya berantusias dengan nilai-nilai yang langsung dipahami dan hasilnya segera dinikmati. Untuk mendapatkan itu ia bisa bekerja keras dan berlaku kasar, namun ia sendiri tidak bertahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin dan berlangsung lama (Boelaars, 1986: 31, 46).

Ketersediaan yang melimpah dari hasil hutan dan hewan buruan serta kesuburan tanah yang memberi panen berlimpah dengan usaha yang minimal menempatkan komunitas rakyat Papua sebagai kelompok yang konsumtif dan pragmatis. Mentalitas konsumtif merupakan suatu gaya hidup di mana setiap *ego* memaksimalkan kepuasan mereka melalui penggunaan sumber-sumber alam dan hasil produksi manusia secara berlebihan. Kecenderungan yang berlebihan dalam meningkatkan kepuasan *ego* menyebabkan terjadinya penumpukan kekayaan, prestise, kesuburan pada diri seseorang, yang dapat menyebabkan pemborosan dan pengabaian aspek efektifitas dan efisiensi penggunaan (*utility*) sumber alam dan hasil produksi manusia. Bagi *ego* demikian, hadirat yang ada di sekitarnya, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, hutan, gunung, sungai, ngarai, dan lain sebagainya merupakan sumber kekayaan yang diperuntukkan baginya (Boelaars, 1986: 53-54). Singkatnya semua yang ada di sekitarku merupakan tatanan kosmik yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan hidup yang berkelimpahan yakni kesehatan, kesuburan, kekayaan, prestise.

Segala perjuangan dan usaha untuk memperoleh hidup yang berlimpah dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan konkret berdasarkan pada perasaan hati dan kebutuhan perut daripada otak dan akal sehat (Alua, 2004: 18; Whiteman, 1984: 96-97). Maka segala aspek yang bersifat reflektif dan rutin, konseptual dan abstrak kurang mendapat tempat dalam pengalaman *ego* rakyat Papua. Karena itu setiap individu selalu berusaha untuk mencoba-coba (berimprovisasi), bersifat spontan dan selalu mencari yang baru yang menguntungkan, dan jika gagal mereka dapat menertawakan diri sendiri. Segala hal dapat dikerjakan sejauh hal tersebut dianggap perlu dalam memperoleh kelimpahan yang segera, dan pekerjaan dapat ditinggalkan jika ada tawaran di sekitarnya yang lebih menarik

perhatiannya karena menjanjikan pemenuhan dan kepuasan langsung yang lebih besar.

Nilai utama rakyat Papua yakni hidup yang berkelimpahan dengan gaya hidup konsumtif dan pragmatis dikategorikan oleh Boelaars (1986) sebagai pola hidup peramu. Meskipun terdapat beberapa etnis Papua yang mulai mempraktekkan pola perladangan sederhana, *basic instinc*-nya masih menunjukkan ketergantungan terhadap alam. Alam adalah hadiah yang terberi untuk dinikmati.

Dalam situasi peralihan pada masa Otsus ini, gaya hidup peramu masih melekat pada sebagian besar rakyat Papua. Secara tipologis, rakyat Papua pada masa lalu bergantung pada alam dan sesama, pada masa Otsus mereka bergantung pada dana-dana Otsus, personalia-personalia penyalur dana Otsus dan jabatan-jabatan di dalam birokrasi, eksekutif dan legislatif. Di sana-sini muncullah peramu-peramu "modern" bukan lagi mengandalkan pada alam tetapi pada uang. Hidup yang berkelimpahan diperoleh melalui Otsus dengan kelimpahan uang dan pembagian atau rebutan jabatan.

Mentalitas peramu yang memperlihatkan gaya hidup konsumtif dan pragmatis mewarnai rakyat Papua dalam masa peralihan ini. Ada korelasi yang erat antara mentalitas peramu yang konsumtif dengan penggunaan uang di tingkat akar rumput dan perebutan kekuasaan di tingkat sebagian elit intelektual Papua. Rakyat Papua yang konsumtif dan pragmatis, mentalitas tersebut memperoleh penguatan dalam era Otsus melalui pembagian uang dan kekuasaan, yang banyak memperoleh kemudahan. Di dalam situasi ini, bagaimana mewartakan Injil kepada rakyat Papua? Apakah pola pastoral yang menekankan pelayanan sakramen dan berpusat pada institusi dengan perangkat aturan dapat menjawab realitas rakyat yang sedang berada dalam situasi peralihan ini? Dapatkah pelayanan pastoral yang berkisar pada altar dan mimbar membawa transformasi bagi kehidupan rakyat? Mungkinkah pola kerja yang berpusat pada (diri) pastor dan (ruang) pastoran dapat membawa perubahan sosial bagi rakyat Papua di tengah situasi peralihan?

Prior yang menggagas pembinaan Petugas Pastoral, mengorientasikan agar para Petugas Pastoral mengembangkan pastoral transformatif dengan mengutamakan tiga hal yakni pengembangan kelompok basis, pelatihan keterampilan dan kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman (Prior, 1997: 7-9). Dalam situasi peralihan di Papua, pola pastoral transformatif yang bagaimana yang dapat menciptakan perubahan sosial bagi rakyat Papua? Manakah isi pengembangan komunitas yang memungkinkan rakyat setempat mampu menantang nilai-nilai dunia secara profetis dan sekaligus menampilkan cara hidup Injili yang meyakinkan? Manakah model-model pelatihan keterampilan yang memberi daya juang

bagi rakyat Papua untuk mensikapi secara kristiani hentakan Otsus melalui pembagian dana dan kekuasaan?

Karya Pastoral di Saat Peralihan

Tujuan dari karya pastoral adalah terciptanya perubahan sosial di tengah rakyat. Cikal bakal perubahan justru terletak pada perubahan paradigma pastoral yang bukan lagi bersandar pada pelayanan kultus-sakramen dan pengembangan struktur kelembagaan tetapi pada kemampuan reflektif yang bersandar pada fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Perubahan paradigma ini menuntut suatu keberanian untuk berjalan bersama umat, menyerap pengalaman-pengalaman mendasar umat dan memperhadapkan pengalaman tersebut dengan pengalaman Kitab Suci atau Ajaran (Sosial) Gereja untuk membangun Kerajaan Allah dalam hidup rakyat Papua.

Perubahan paradigma ini berlanjut pada metode berpastoral. Pastoral yang berfokus pada pengalaman hidup sehari-hari dalam dunia ditempatkan dalam terang Injil. Hasil perjumpaan antara pengalaman hidup dengan Injil akan melahirkan tindakan yang semakin terarah kepada kehendak Allah bagi manusia, terutama mereka yang miskin, terlantar dan tertindas. Usaha kongkret yang dapat dilakukan adalah menengakkan keadilan, memperjuangkan perdamaian, mengutamakan kesejahteraan bersama, menumbuhkan kebajikan-kebajikan kristiani seturut Sabda Bahagia (Mat 5: 3-12).

Dalam situasi peralihan di Papua saat ini, di mana rakyat tidak memiliki kepastian pegangan antara kelimpahan uang dan pengisian jabatan-jabatan strategis birokarasi, legislatif di satu pihak dengan nilai-nilai injili pada lain pihak, kualitas keberhasilan karya pastoral, hendaknya memperhatikan isi pengembangan komunitas basis dengan menekankan dua hal yakni advokasi dan mediasi. Dengan kata lain,ewartakan Injil pada situasi peralihan ini memberi fokus pada advokasi dan mediasi bagi komunitas-komunitas basis yang ada. Kepekaan dalam membaca hasrat terdalam dari rakyat serta nilai utama dalam budaya yang menggejala merupakan aspek pendukung yang membantu refleksi atas pengalaman rakyat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai urgensinya advokasi dan mediasi pada masa Otsus ini, terlebih dahulu digambarkan catatan teknis pastoral transformatif.

Ruang untuk advokasi dan mediasi adalah Komunitas Basis. Komunitas-komunitas Basis ini berada dalam paroki (*ecclesia ecclesiarum*). Di dalam paroki terdapat komunitas-komunitas yang memiliki basis beraneka ragam baik yang bersifat teritorial maupun kategorial. Advokasi dan Mediasi

perlu "dimatangkan" dalam "bejana" Komunitas Basis, melalui sharing bersama akan kehadiran Allah berdasarkan korelasi antara perjuangan (pengalaman) hidup umat dengan pengalaman iman akan kehadiran Allah. Kitab Suci dan Ajaran (Sosial) Gereja merupakan fokus atau titik refleksi untuk menggumuli situasi dan sumber untuk merumuskan tindakan.

Bentuknya berupa (1) pencerahan (*discernment*) yakni penyadaran akan realitas yang ada dan akan pentingnya advokasi dan mediasi. Tujuannya agar komunitas basis memperoleh pengetahuan yang memadai perihal advokasi dan mediasi, menyadari akan situasi yang ada karena itu dapat mengambil sikap dan menentukan pilihan terhadap tawaran yang ada serta menjadi kritis atas fenomena empiris yang ada. Kegiatan pencerahan berupa ceramah, diskusi, sarasehan, musyawarah, pengajaran, dan sebagainya. (2) Pelatihan berupa latihan-latihan keterampilan dalam memberikan advokasi dan mediasi. Ini merupakan peningkatan kualitas dalam hal *skill* (keterampilan) agar dapat melakukan advokasi dan mediasi. Sejumlah keterampilan yang dapat dikembangkan misalnya dalam hal mendengarkan, gaya kepemimpinan, mencatat-mendata-merumuskan masalah-melaporkan, berdiskusi dan berdebat, dialog dan agitasi; dan sebagainya. (3) Pendalaman berupa pembobotan rohani sebagai sikap dasar dalam kehidupan untuk menumbuhkan spiritualitas transformatif dalam pelaksanaan tugas-tugas advokasi dan mediasi. Tujuannya untuk meningkatkan semangat juang, memperkuat komitmen, mengembangkan dedikasi, menumbuhkan loyalitas dan menempatkan usaha advokasi dan mediasi sebagai bentuk pengabdian terhadap sesama dan pengabdian kepada Tuhan. Bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan berupa rekoleksi, retreat, triduum, perayaan ekaristi khusus; dan sebagainya. Untuk dapat melaksanakan bentuk kegiatan ini modul-modul perlu disiapkan, perangkat kerja perlu diadakan, mekanisme kerja perlu dirancang, fungsi-fungsi dari struktur kerja perlu dirumuskan.

Sasarannya adalah Orang Muda Katolik, karena kelompok inilah yang memiliki dinamika yang tinggi dan vitalitas yang kuat untuk mendorong terjadinya perubahan. Bentuk-bentuk yang dikemukakan di atas dialamtkan kepada Orang Muda Katolik.

Metode kerja berupa aksi-refleksi-aksi. Pergumulan umat dalam realitas Otsus masa kini perlu dipertanyakan makna bagi kristianitas kita dan faedahnya dalam pemikiran Gereja sebagai sakramen keselamatan dunia. Metode ini memposisikan rakyat teristimewa agen-agen perubahan sosial untuk memperhadapkan realitas dengan Kitab Suci dan Ajaran (Sosial) Gereja guna menemukan dimensi iman dalam pergumulan hidup segenap anggota komunitas basis. Dari hasil refleksi tersebut, akan dirumuskan aksi, suatu kegiatan lanjutan dicanangkan agar komunitas basis mengkongkritkan upaya perubahan sebagai tindakan pastoral. Aksi ini merupakan usaha

bersama-sama dalam komunitas basis dan antar komunitas basis untuk menanggapi panggilan Allah. Situasi baru yang tercipta karena aksi tersebut perlu dievaluasi, direfleksikan sehingga terjadi proses dialektis secara dinamis antara aksi, refleksi, aksi (Desa, tt: 37-38).

Lingkup penggunaan kata advokasi dan mediasi sejatinya bersinggungan dengan dunia hukum. Pergeseran paradigma pemikiran tentang pembelaan terhadap kaum tertindas dan terpinggirkan menyeret masuk kedua istilah ini dalam bidang pemberdayaan (*empowering*) rakyat kecil. Dalam situasi rakyat Papua yang menghadapi gejolak Otsus melalui bagi-bagi uang dan *share* kekuasaan, advokasi dan mediasi merupakan suatu pendekatan pastoral yang memberikan pembelaan dan pendampingan terhadap rakyat Papua untuk bersama-sama melakukan usaha-usaha ke arah transformasi sosial secara sistimatis, strategis, terencana dan berkelanjutan, sehingga dana dan kekuasaan menciptakan keadilan sosial dan menjangkau semua rakyat demi kesejahteraan bersama.

Advokasi merujuk pada bentuk-bentuk kegiatan komunitas basis yang bersifat pembelaan terhadap rakyat dalam hal pemahaman terhadap UU Otsus. Di tengah rakyat Papua UU Otsus dipersempit pada (1) penggunaan uang yang dikucurkan oleh pemerintahan kepada rakyat dan (2) gejolak pemekaran kabupaten atau provinsi yang digelinding oleh elit-elit intelektual dalam rangka Otsus. Bentuk kegiatan advokai bukan terletak pada bagaimana menggunakan uang yang dibagikan dan merebut kekuasaan atas pemekaran daerah. Kegiatan advokasi berupa membangun suatu sistim pada tingkat akar rumput (komunitas basis) agar tercipta perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional bagi kepentingan rakyat Papua. Desakan-desakan dari akar rumput meliputi proses-proses penyadaran dan mekanisme politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintahan yang berkuasa.

Manakala rakyat dijejali dengan uang dan iming-iming kekuasaan sehingga menjadi buta terhadap kejahatan yang bersifat struktural dan mengabaikan substansi persoalan yang di hadapi oleh rakyat Papua seperti ketidakadilan, ketertindasan, pembelokan persoalan, pelecehan terhadap harga diri dan martabatnya, tindakan advokasi dengan menelusuri kelompok-kelompok kepentingan dan menemukan tangan-tangan yang tak kelihatan serta membuat analisa kebijakan dengan pertanyaan utama untuk kepentingan siapa UU Otsus ataupun suatu kebijakan diputuskan. Tindakan advokasi akan menciptakan daya kritis pada rakyat Papua di tingkat komunitas basis, terjadi proses penyadaran bersama yang dapat melahirkan kekuatan dalam bentuk *people power* demi perubahan sosial yang lebih radikal. Hal ini hanya mungkin jika kegiatan advokasi dilakukan secara bersama-



sama pada setiap komunitas basis dalam suatu rentang waktu yang sama dengan isu yang sama.¹⁹

Mediasi dalam pola kerja pastoral tidak pertama-tama dipahami sebagai suatu proses penyelesaian sengketa dari pihak-pihak yang berselisih. Mediasi lebih dilihat sebagai proses pendampingan terhadap rakyat agar tidak menjadi korban dari suatu kebijakan politik. Dalam kerangka Otsus, mediasi merujuk pada pendampingan terhadap rakyat di tingkat komunitas basis agar uang-uang dan jabatan-jabatan politis dari pemekaran daerah, berdaya guna dan berhasil guna bagi rakyat. Agen-agen pembaharu di tingkat komunitas basis menjadi mediator antara komunitas basis dengan pejabat pemerintahan.²⁰ Dalam arti ini mediator berfungsi sebagai fasilitator.

Proses mediasi memungkinkan terciptanya komunikasi yang efektif antara komunitas basis dengan aparat pelaksana kebijakan dan juga dengan para penentu kebijakan di pemerintahan. Manakalah dana-dana Otsus digelontorkan kepada rakyat dengan tidak terkontrol dan peluang-peluang berkuasa diberikan tanpa melalui suatu pertimbangan obyektif, kegiatan mediasi dibutuhkan untuk membantu agar uang dan kekuasaan tepat sarannya dan menyentuh konteks persoalan yang dialami oleh rakyat. Manakala terjadi peningkatan tuntutan rakyat terlalu tinggi untuk mendapat bagian dari dana Otsus dan desakan yang begitu kuat akan pemekaran wilayah (kabupaten, provinsi) agar terjadi *share* kekuasaan, kegiatan mediasi mengarahkan rakyat pada tingkat komunitas basis untuk menekan bahwa kualitas hidup manusia bukan terletak pada uang dan kekuasaan. Jika mediasi berlangsung simultan dan sistematis, akan tercipta suatu proses pemahaman bersama antara warga komunitas basis di satu pihak dengan penentu dan pelaksana kebijakan pemerintahan di lain pihak. Kegiatan dalam proses mediasi membutuhkan keterbukaan, pemahaman bersama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif bagi kepentingan rakyat dan kesejahteraan bersama.

Melalui advokasi dan mediasi rakyat Papua dapat memperoleh pemahaman bahwa hidup bukan hanya berdimensi material dan pragmatis tetapi memiliki kedalaman, keluasan dan keluhuran. Kedalaman berhubungan dengan disposisi bathin terhadap nilai-nilai kemanusiaan

¹⁹ Pembahasan yang mendetail tentang advokasi dapat dilihat pada Suharto, 2006.

²⁰ Setiap tingkat dan jenjang mempunyai agen-agen perubahan sosial yang berbeda. Misalnya di tingkat komunitas basis penggerak-penggerak komunitas basis berhadapan dengan ketua RT/RW dan kepala kampung. Demikian di tingkat paroki pastor berhadapan dengan kepala distrik (dan/atau pejabat tingkat distrik) atau bupati, dekan dengan bupati (dan/atau pejabat tingkat kabupaten) Uskup dengan gubernur (dan/atau pejabat tingkat provinsi).

universal, yang mempertebal kualitas pengabdian terhadap sesama dan semesta. Disposisi bathin terhadap nilai kemanusiaan mengarahkan setiap orang untuk bertindak demi menjaga kemanusiaan yang utuh. Keluasan terkait dengan spektrum pemikiran yang tidak membatasi diri dalam ego yang tertutup tetapi menjangkau sesama tanpa sekat dan perbedaan. Sesama adalah "wajah" yang menuntut saya untuk berbuat kebajikan dan mempraktekan cinta altruistis padanya. Keluhuran terkait erat dengan religioitas rakyat, suatu pengalaman akan "Yang Absolut". Pengalaman tersebut memberi terang baginya untuk membangun Papua baru.

Melalui advokasi dan mediasi, rakyat Papua dapat menempatkan uang bukan lagi sebagai "mamon" tetapi sebagai sumber pemberdayaan rakyat demi kesejahteraan bersama. Kekuasaan bukan lagi sebagai tirani kediktatoran tetapi sebagai sarana pelayanan kepentingan umum.

Penutup

Bagi Gereja Papua, Otsus merupakan peluang sekaligus tantangan mewartakan Injil. Adanya kelimpahan uang dan pemekaran wilayah (kabupaten dan provinsi) merupakan peluang karena akan memberi kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pewartaan Injil dan sumber pemberdayaan terhadap rakyat. Menjadi tantangan karena mentalitas hidup rakyat yang konsumtif dan pragmatis akan mengikis semangat kerja keras dan menghambat kemandirian.

Tantangan ini ditanggapi dengan pengembangan komunitas basis dan pelatihan-pelatihan keterampilan di dalam komunitas basis. Isi dari kegiatan komunitas basis adalah advokasi dan mediasi. Kegiatan advokasi dan mediasi perlu disoroti dalam terang iman yakni Kitab Suci dan Ajaran (Sosial) Gereja berdasarkan pengalaman real rakyat. Hasil "perjumpaan" antara terang Iman dengan pengalaman real dapat melahirkan suatu tindakan baru untuk menciptakan situasi baru yang memperlihatkan adanya transformasi di tengah rakyat.



Daftar ujukan

- Alua, Agus A. 2004. *Karakteristik Dasar Agama-Agama Melanesia*. Biro Penelitian STFT Fajar Timur: Jayapura.
- Boelaars, Dr. Jan. 1986. *Manusia Irian. Dabulu, Sekarang, Masa Depan*. Gramedia: Jakarta

- van den Broek, OFM; Drs Theo. 1998. Pembangunan, Agama dan Perubahan Masyarakat di Provinsi Irian Jaya, dalam Dr. P.M. Laksono (ed) *Seri Siasat Kebudayaan. Kekayaan, Agama & Kekuasaan. Identitas dan Konflik di Indonesia (Timur) Modern*. Kanisius–Realino: Yogyakarta. (33–75).
- Desa, Hardus. tanpa tahun (tt). *Formatio & Training Komunias Basis Gerejawi*, dalam Keuskupan Jayapura. (tt). *Pengembangan Komunitas Basis Gerejawi*. Keuskupan Jayapura: Jayapura.
- Giay, Dr. Benny. 2000. *Menuju Papua Baru. Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang Papua*. Deiyai/Elsham Papua: Jayapura.
- Prior, John Mansford. 1993. *Bejana Tanah Nan Indah*. Nusa Indah: Ende.
- Prior, John Mansford. 1996. Allah atau Mamon: Tatanan Ekonomi yang Bertabrakan. Dalam SAWI, No. 11 Oktober. (54-62).
- Prior, John Mansford. 2000. “Human Values and Pursuit of a Full Humanity in Asia” dalam *FABC Papers*. No. 92p: Hongkong. Didownload dari www.ucanews.com/html/fabc-papers/fabc-0-htm
- Prior, John Mansford. 1997. *Pembinaan Petugas Pastoral. Orientasi Calon Imam dan Diakon*. Seri Pastoral 278. Bidang Pembangunan Jemaat. Pusat Pastoral: Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2006. Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat, dalam www.policy.hu/suharto/naskah%20PDF
- Umar, Prof. Dr. Hasan Basri dan Drs. Adolf Z.D. Siahay, SE., M.Si., Ak. 2006. *Papua. Potret Pengelolaan Kenangan Daerah dan Pelayanan Publik*. Pustaka Refleksi: Makasar.
- UU RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sekretaris Daerah Provinsi Papua: Jayapura.
- Whiteman, Darrell. 1984. Melanesian Religions: An Overview. Salvation in Melanesian Religions. Dalam Ennio Mantovani (eds) *An Introduction to Melanesian Religions*. Point Series No. 6. The Melanesian Institute For Pastoral and Socio-Economic Service: Goroka. (87 – 114)